



Judul	: Tumpukan sampah di Bali ganggu pariwisata, Komisi VII: percepat program olah sampah jadi energi
Tanggal	: Kamis, 05 Februari 2026
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 3

Tumpukan Sampah Di Bali Ganggu Pariwisata

Komisi VII: Percepat Program Olah Sampah Jadi Energi

Senayan menyoroti masalah sampah di Bali yang sempat disinggung Presiden Prabowo Subianto.

Untuk mengatasinya, perlu langkah yang cepat serta terkoordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

ANGGOTA Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay menilai, persoalan sampah di Bali sudah lama terjadi. Kini persoalan itu berkembang jadi masalah serius yang tak cuma mengganggu dalam aspek pariwisata, tapi juga menyentuh aspek lingkungan dan citra nasional.

Tumpukan sampah yang tidak tertangani secara sistematis mencerminkan lemahnya koordinasi lintas sektor dan belum optimalnya kebijakan pengelolaan limbah. "Situasi itu menimbulkan keresahan bagi masyarakat, pelaku usaha pariwisata, dan Pemda," ujar Saleh dalam keterangannya, Rabu (4/2/2026).

Pemerintah, lanjutnya, telah memiliki program pengolahan sampah menjadi energi melalui skema *waste to energy* yang dirancang sebagai solusi jangka panjang. Program itu direncanakan dibangun di puluhan kota sebagai bagian dari strategi nasional pengelolaan limbah. Untuk tahun ini, akan dibangun di 34 kota.

Posisi Bali sebagai destinasi

utama pariwisata nasional, sambungnya, membuat daerah itu layak mendapat prioritas khusus. Tanpa percepatan program, persoalan sampah akan terus berulang dan menggerus daya saing pariwisata. Untuk itu, harus ada koordinasi antara pusat dan daerah dalam menyusun rencana penanganan sampah yang terukur.

"Pendekatan parsial dan sektoral tidak lagi relevan menghadapi persoalan lingkungan yang kompleks. Kemenpar dan Pemprov Bali perlu duduk bersama membuat rencana utama dan prioritas," jelasnya.

Menurutnya, program nasional juga perlu diperkuat dengan berbagai inisiatif pendukung seperti bank sampah, Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce-Reuse-Rcycle* (TPS3R), dan pengolahan berbasis komunitas. Pendekatan itu dianggap bisa memperluas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

"Saya dengar ada juga Gerakan Indonesia Asri, Optimal-



Saleh Partaonan Daulay

iasi Bank Sampah, TPS3R, dan rumah Maggot," ujar legislator Fraksi PAN itu.

Dia menegaskan, penanganan sampah tidak boleh terus ditunda dengan alasan administratif atau teknis. Pemerintah Pusat dan Daerah harus bergerak cepat serta konsisten dalam mengeksekusi kebijakan, karena sampah yang tidak terkelola dengan baik tidak memberi nilai positif bagi siapa pun.

Dalam konteks pengawasan, Saleh menyatakan, Komisi VII DPR akan mengawal pelaksanaan program persampahan. DPR juga siap terlibat jika dibutuhkan regulasi tambahan untuk memperkuat kebijakan lingkungan. "Suatu negara dikatakan maju

jika negara itu bersih. Karena itu kebersihan adalah ciri utama negara maju," imbuhnya.

Sejalan dengan itu, anggota Komisi VII DPR Samuel JD Wattimena menegaskan, persoalan kebersihan bukan hanya tanggung jawab Kemenpar, tapi melibatkan banyak kementerian dan Pemda. Namun, Kemenpar dinilai tetap harus aktif memantau pelaksanaan program di lapangan, dan tidak hanya menyampaikan imbauan.

Politikus PDIP itu menilai, kritik Presiden terhadap kondisi destinasi wisata harus dijadikan momen momentum pembentahan menyeluruh. Pendekatan reaktif tidak cukup untuk menciptakan perubahan jangka panjang.

"Jangan menunggu viral dulu baru bergerak. Yang dibutuhkan itu pemantauan rutin dan evaluasi," ujarnya.

Samuel juga menyoroti dampak persoalan sampah terhadap minat kunjungan wisatawan. Kebersihan destinasi berpengaruh langsung terhadap citra pariwisata nasional. Jika pantainya kotor, lingkungannya tidak terjaga, tentu saja akan jadi catatan buruk. Komisinya akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pariwisata.

"Pengelolaan kebersihan ha-

rus menjadi bagian utama pembangunan pariwisata berkelanjutan. Kita ingin pariwisata tumbuh, tapi juga tertata dan nyaman," katanya.

Menanggapi hal itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengungkapkan, telah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Menteri Investasi terkait proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Groundbreaking proyek itu dijadwalkan Maret 2026 dengan waktu pekerjaan paling lama 12 bulan dan 2027 siap beroperasi.

Koster meyakini, beroperasinya PSEL akan mempercepat penanganan sampah, terutama di Badung dan Denpasar. Teknologi itu akan diperkuat dengan komposter dan sistem pengolahan modern lainnya. "Pak Presiden sangat concern terhadap Bali karena destinasi utama. Beliau mengingatkan supaya kita bergerak lebih cepat," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegur jajaran Pemda Bali terkait persoalan sampah. Persoalan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi konkret. "Penyelesaian masalah sampah perlu kerja sama pusat dan daerah. Tapi kita tidak boleh menunggu," tandasnya. ■ PYB